

Al-A'raf

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta

Penanggung Jawab

Abdul Matin Bin Salman (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah)

Pemimpin Redaksi

Nurisman

Sekretaris Redaksi

Tsalis Muttaqin

Dewan Redaksi

Islah Gusmian

Ari Hikmawati

Tsalis Muttaqin

Waryunah Irmawati

Siti Nurlaili Muhadiyatiningih

Kasmuri

Syamsul Bakri

Redaktur Ahli

Mark Woodward (Arizona State University, Tempe, USA)

Mahmoud Ayoub (Hatford Theological Seminary, Connecticut, USA)

Florian Pohl (Emory University, Georgia, USA)

Nashruddin Baidan (STAIN Surakarta)

Damarjati Supadjar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Tata Usaha

Heny Sayekti Puji Lestari

Gunawan Bagdiono

Alamat Redaksi:

Sekretariat Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo (0271) 781516

Email: jurnal.usnuluddinsolo@gmail.com

Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun tanpa mesti sejalan dengan pandangan redaksi. Redaksi berhak menyunting, dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima tanpa mengubah substansinya. Adapun isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Naskah tulisan berkisar sekitar 15-20 halaman kuarto dengan spasi ganda dalam bentuk disket dan *print out*-nya. Naskah disertai abstrak dalam bahasa asing (Arab atau Inggris).

AGAMA DI TENGAH KONFLIK SOSIAL*

Tinjauan Sosiologis Atas Potensi Konflik Keberagaman Agama di Masyarakat

Nur Kafid

Dosen Sosiologi Agama FUD IAIN Surakarta

Abstrak : Studi dilakukan untuk menggambarkan persepsi umum masyarakat tentang realitas keberagaman agama, dengan fokus perhatian pada proses dan dinamika munculnya sentimen keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pemeluk agama non-Islam di tengah komunitas Muslim mayoritas, seringkali mendapat sorotan, baik dari aktifitasnya di bidang ibadah keagamaan maupun pada hubungan sosial kemasyarakatan lainnya. Sikap toleransi yang ada hanya berhenti pada level hubungan kemanusiaan, dan belum menyentuh pada level kesadaran tentang keberbedaan aspek keagamaan itu sendiri. Akibatnya, selalu muncul kegelisahan dan gesekan yang menyebabkan ketidakbaikan hubungan antar umat beragama. Sehingga lahirlah suatu prasangka, bahwa apapun bentuk kerja sosial yang dilakukan dinilai sebagai bagian dari upaya peng-agama-an (Kristenisasi).

Abstract : *The study aims to describe public perception about the reality of religious diversity, with the main focus on the dynamic and process of emerging religious' sentiment in the daily lives. The existence of non-Islamic religious believers within Muslim majority community, have always getting serious concern, from their religious activities up to their social relations. The attitude of tolerance were still resided on the human relation level, and were not touched yet on the awareness level about the essence of the religious diversities' itself. As its consequences, various friction and restlessness were always emerged and caused disharmony relation among them. Furthermore, various prejudices were always rising that any social activities done by them (non-Islamic believer) have assessed as part of their effort of Christianization.*

Keywords: *perception, symbol, and disharmony*

A. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar orang Indonesia, berbagai persoalan terkait kehidupan intra dan antar umat beragama, mulai dari ekspresi keagamaan sampai pada pendirian rumah ibadah, mungkin bukan lagi hal baru atau bahkan sudah dianggap usang. Bisa jadi karena berbagai persoalan yang muncul selalu dianggap sebagai bagian dari bungkus (kedok) atas persoalan ekonomi ataupun politik. Tapi diakui atau tidak, persoalan ini seolah tidak pernah ditemukan ujung pangkal penyelesaiannya. Meski berbagai cara telah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pembinaan, sampai pada dibuatnya berbagai aturan dan kebijakan, namun berbagai persoalan serupa seolah terus muncul. Kapan saja dan di mana saja. Bahkan dalam skala tertentu bisa menjadi ancaman bagi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hiruk-pikuk pemilihan umum presiden pada tahun 2014 lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita. Setiap orang pasti memiliki catatan tersendiri atas proses dan dinamikanya. Namun ada satu catatan penting penulis dari hajatan rakyat tersebut. Yakni, kentalnya fenomena ‘instrumentalisasi agama’. Simbol-simbol agama sangat kental digunakan oleh para kandidat dan tim pemenangannya dalam upaya meraih dukungan. Dan jelas, agama menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi elektabilitas si calon presiden. Tapi di sisi lain, simbol dan ekspresi keagamaan pun kerap menjadi pemantik jitu konflik sosial. Kejadian di Tolikara, Papua—tanpa bermaksud mengabaikan persoalan sejenis di tempat lain—bisa menjadi catatan ‘buruk’ terkini relasi sosial-keagamaan masyarakat di Indonesia.

Realitas tersebut di atas, bisa menjadi bukti nyata bahwa relasi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia masih perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pasalnya, jika relasi sosial ini tidak di-*manage* dengan baik, maka kohesivitas sosial akan makin luntur, dan keutuhan bangsa ini menjadi taruhannya.

Bagaimanakah sebenarnya relasi sosial-keagamaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia: mulai dari persepsi, pemaknaan agama beserta simbol-simbolnya, sampai dengan imajinasinya tentang sebuah perdamaian. Di sinilah urgensi tulisan ini: diharapkan mampu menjadi sebuah inspirasi untuk menumbuhkembangkan kesadaran bersama dalam rangka menjalin hubungan sosial-keagamaan yang lebih baik dan bernuansa damai, serta mampu memunculkan kesadaran tentang perbedaan serta pengakuan terhadap hak-hak yang dilindungi dan bisa dinikmati oleh masing-masing

pemeluk agama dalam menjalankan aktifitas sosial dan keagamaannya tanpa stigma dan intimidasi.

Di Indonesia, keberadaan pemeluk agama non-Islam atau kelompok yang dianggap bukan sebagai bagian dari Islam, seringkali mendapat sorotan; mulai dari berbagai aktifitasnya dibidang ibadah keagamaan, pendidikan, maupun hubungan sosial-kemasyarakatan lainnya. Maka tidak heran jika selalu muncul kegelisahan, gesekan, bahkan tidak jarang yang kemudian berujung pada kejadian yang menyebabkan ketidakbaikan hubungan antar umat beragama.

Secara statistik, mayoritas penduduk Indonesia memang Muslim. Tetapi, Indonesia bukanlah Negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Di mana, adalah hak setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya yang dijamin penuh oleh Undang-Undang. Namun mereka yang secara statistik minoritas, hampir selalu dipandang penuh stigmatik, mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan intimidatif.

Sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dan berkeyakinan selama ini (kebanyakan) berhenti pada level hubungan kemanusiaan (semata), dan belum menyentuh pada level kesadaran tentang keberbedaan aspek keagamaan itu sendiri. Dengan kata lain, hubungan orang per-orang antar pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda tidak membatasi pergaulan mereka dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada pula yang membingkai hubungan sosial itu dalam kerangka kewarganegaraan yang hidup dan tinggal di suatu wilayah. Tapi pergaulan itu belum mampu membuka kesadaran mengenai hak dari masing-masing pemeluk agama dan keyakinan, seperti hak untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah, bahkan sampai pada hak untuk menduduki jabatan publik (Bupati/Walikota, Gubernur, ataupun Presiden). Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu prasangka, bahwa apapun bentuk kerja sosial yang dilakukan (kadang-kala) dinilai sebagai bagian dari upaya peng-agama-an (baca: *Islamisasi atau Kristenisasi*).

Dengan mengambil studi kasus di salah satu kelurahan wilayah Jakarta Timur¹, dengan pertimbangan mendasar: *pertama*, keberadaan tempat ibadah (gereja) di tengah komunitas Muslim yang kerap mendapat sorotan, terutama dengan berbagai aktifitasnya dibidang ibadah keagamaan, pendidikan maupun hubungan sosial-

¹ Di tulisan ini, nama wilayah tidak disebut secara jelas, dengan pertimbangan sesuai permintaan informan dengan alasan demi kenyamanan mereka dalam menjalankan aktifitas ibadah dan hubungan sosial sehari-hari.

kemasyarakatan lainnya; *kedua*, munculnya kegelisahan, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim terhadap kemungkinan didirikannya tempat ibadah baru; *ketiga*, munculnya beberapa kejadian yang menyebabkan ketidakbaikan hubungan antara umat beragama; *keempat*, sulitnya mendirikan tempat ibadah yang diasumsikan karena adanya beberapa tokoh masyarakat yang tidak mendukung.

Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap persepsi masyarakat tentang keberagaman (agama), dengan fokus perhatian pada persoalan; sejak kapan sentimen-sentimen keagamaan itu (di)munculkan(kan), siapa dan dari kelompok mana pembawa sentimen agama itu, dengan cara apa (dan bagaimana) sentimen keagamaan itu dibangun. Maka dari itulah sangat penting untuk melihat, antara lain; pandangan, sikap, dan tindakan para tokoh/elite agama dan masyarakat (termasuk aparatur pemerintah setempat), juga beberapa anggota masyarakat terhadap persoalan ini.

B. PEMAKNAN AGAMA

Merujuk pandangan Clifford Geertz, agama merupakan suatu sistem simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistik². Di sini terlihat jelas, bahwa agama berfungsi sebagai pemberi sistem makna. Tentu saja ini penting, karena tanpa sistem makna dunia bagi manusia akan menjadi *chaos*: tidak hanya tanpa arti atau makna, tapi juga tidak dapat dimengerti.

Hal yang kurang lebih sama juga dikatakan oleh Peter L. Berger, “Apapun artinya..., agama adalah suatu semesta makna yang dibangun manusia...”³. Dan tampaknya mustahil bagi manusia mampu hidup dan membangun sistem kemasyarakatannya tanpa ada semesta makna ini. Menurut Berger, manusia hidup dalam dunia sosial berarti menjalani kehidupan yang tertib dan bermakna. Sementara masyarakat sendiri adalah pengawal tatanan dan makna, tidak saja secara obyektif dalam struktur kelembagaannya tapi juga secara subyektif dan

² Clifford Geertz, *The Interpretation of culture: Selected Essays*, (NewYork: Basic Books, 1992), h.5

³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (Penguin Books, 1991), h. 203.

penstrukturannya atas kesadaran individual. Dalam konteks ini pula, agama menjadi penting atau tidak tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai berbagai aspek kehidupan menurut sudut pandang masing-masing. Rujukan pemahaman dan pemaknaan yang bernuansa teologis kerap tidak bisa dihindari, karena pada titik itulah manusia menganggap dirinya eksis sebagai makhluk yang beragama.

Secara empirik terjadi ragam pemahaman dan perilaku keagamaan masyarakat. Ide-ide dan gagasan konseptual tentang agama bisa terlihat dari ungkapan, sudut pandang, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tampaknya masih memandangi pemeluk agama yang berbeda sebagai pihak 'di seberang sana, asing, dan berbahaya'.

Di salah satu kelurahan di Jakarta Timur, sangat terlihat bagaimana perbedaan agama tetap menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai dan memandangi kelompok yang lain (berbeda agama/keyakinan). Meskipun harus pula diakui, bahwa tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Masih ada beberapa anggota masyarakat yang menyikapi perbedaan agama sebagai hal wajar, dan tidak melakukan tindakan yang meresahkan kelompok lain.

C. METODOLOGI

Guna menghasilkan data yang komprehensif, penelitian dengan tema: Agama di Tengah Konflik Sosial; Tinjauan Sosiologis Atas Potensi Konflik Keberagaman Agama di Masyarakat, dengan studi di daerah Jakarta Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dan berpedoman pada *interview guide*, peneliti mengumpulkan data primer dari 25 informan kunci yang dianggap relevan, mengetahui situasi dan kondisi wilayah beserta berbagai persoalan terkait keberagaman agama yang pernah terjadi. Mereka adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pejabat pemerintah setempat, ditambah dengan beberapa warga masyarakat umum. Selanjutnya, demi mempertajam analisis data primer peneliti juga melakukan kajian pustaka (*library research*) dari berbagai sumber seperti; buku, majalah, surat kabar, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis. Untuk mempermudah proses tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah, mereduksinya melalui proses penyusunan abstraksi, dan mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama. Setelah itu, baru masuk ke dalam tahap penafsiran data yang

didasarkan pada pendekatan substansi teoritis yang ada. Sehingga terbuka kemungkinan untuk menemukan metode, konsep atau teori baru dalam menganalisis persoalan sejenis.

D. HUBUNGAN SOSIAL

Masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah rentan konflik bernuansa agama seperti halnya masyarakat di wilayah lokasi penelitian ini, umumnya membedakan antara hubungan sosial-kemasyarakatan (hubungan sosial sehari-hari) dan hubungan keagamaan (yang bersifat teologis). Yang pertama dimaknai sebagai hubungan yang terjalin antar orang per-orang berdasarkan status dan perannya sebagai warga masyarakat. Sedangkan bagian kedua dianggap sebagai sebuah hubungan yang dibangun berdasarkan kesamaan atau perbedaan agama/keyakinan. Dengan kata lain, ada pemahaman untuk memisahkan antara hubungan sosial-kemasyarakatan: antara warga Muslim dan non-Muslim itu boleh dan bisa secara bersama-sama bekerjasama, dengan hubungan terkait masalah keagamaan yang bersifat personal: asalkan satu sama lain bisa saling menjaga, menghargai, dan menghormati.

Secara umum, hubungan sosial-kemasyarakatan warga itu baik, toleran, dan kondusif. Ada rasa toleransi serta kesadaran yang tinggi untuk bekerjasama, meskipun agama dan keyakinannya berbeda-beda. Kesadaran hidup bertetangga membuat masyarakat mampu menghargai keberadaan masing-masing sebagai sesama manusia, sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Mereka bisa saling bekerjasama, melakukan kegiatan bersama, dan saling bantu-membantu.

Hubungan sosial keseharian masyarakat dalam konteks ini bisa dipetakan menjadi empat (4) sub-kategori. *Pertama*, hubungan sosial-kemasyarakatan yang bersifat hubungan sosial sehari-hari atau hubungan bertetangga. Hubungan sosial ini baik, toleran, dan kondusif. Pada saat perayaan hari besar keagamaan, baik Natal maupun Idul Fitri, maupun hari-hari besar nasional, semua terlihat saling berkunjung, membantu, dan bekerjasama. Selain karena adanya rasa toleransi, juga adanya pemahaman bahwa semua sama-sama warga negara Indonesia, yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga semua warga mempunyai kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam kerjasama sosial serta bergotong-royong.

Namun demikian, rasa keterbukaan dan sikap toleransi itu bukan berarti bahwa di dalam hubungan sosial sehari-hari tidak terdapat gejolak. Keragaman masyarakat tetap saja memunculkan suatu

sikap dan sudut pandang yang tidak baik (bahkan negatif) terhadap kelompok lain, suatu letupan yang kerap muncul dalam relasi sosial, seperti stigma atau ejekan terhadap keberadaan kelompok dari agama/keyakinan yang berbeda.

Kedua, hubungan sosial dalam bentuk kerjasama sosial. Kegiatan sosial ini pun terlihat baik. Semua warga masyarakat terlibat dan dilibatkan dalam segala kegiatan dan aktifitas. Seperti kerja bakti, Siskamling, kepengurusan organisasi Rukun Tetangga (RT), pembagian sembako, pemberantasan sarang nyamuk, undangan hajatan pernikahan, dan lain sebagainya.

Ketiga, hubungan keagamaan. Yang dimaksud di sini adalah hubungan sosial berdasarkan agama/keyakinan (*aqidah*). Setiap warga masyarakat tentu mempunyai persepsi serta rasionalisasi yang berbeda-beda mengenai hubungan keagamaan/keyakinan ini. Jika secara sosial-kemasyarakatan semua hal bisa dikerjasamakan (tanpa memandang agama/keyakinan), sedangkan jenis hubungan ini kebanyakan dianggap tidak bisa dikerjasamakan, karena sifatnya dianggap personal. Bahkan tidak jarang yang menganggap bahwa hubungan jenis ini tabu untuk dibicarakan. Maka tidak heran jika jenis hubungan ini hampir tidak pernah terdengar untuk didiskusikan, atau dikaji bersama-sama. Akibatnya, masing-masing pihak (kelompok) memiliki asumsi sendiri-sendiri terhadap yang lain.

E. PROBLEM YANG MUNCUL

Meski secara umum dinamika hubungan sosial-masyarakat itu baik, tapi ketika ditelisik lebih dalam, ternyata dinamika tersebut melahirkan beberapa persoalan. *Pertama*, warga masyarakat bisa dikatakan tidak mempunyai persoalan dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatannya (bertetangga). Karena hubungan sosial itu kadangkala melibatkan aspek keagamaan, maka ia kerap menimbulkan persoalan yang membuat hubungan sosial itu bermasalah. Aspek keagamaan inilah yang justru memperumit hubungan sosial itu. Beberapa persoalan yang dianggap serius oleh warga muslim di antaranya; soal pembangunan fisik gereja, anggapan terhadap upaya Kristenisasi, serta kekhawatiran masa depan agama dan keturunannya.

Persoalan-persoalan tersebut memang tidak selalu berujung tindakan anarkis. Tapi, karena ketidakjelasan hukum serta 'kebingungan' pemerintah untuk bertindak tegas menjadi kegelisahan, bahkan bagai api dalam sekam yang selalu menghantui masa depan

keberagaman serta keutuhan Negara.⁴ Namun demikian, menyalahkan sepenuhnya pemerintah tentu bukanlah akhir atau solusi atas permasalahan sebenarnya. Sebanyak apapun regulasi, seketat apapun pengawasan, bahkan sekeras apapun tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, jika problem dasar mengenai pandangan dan sikap yang bijak atas keragaman agama/keyakinan itu tidak ditanamkan sejak dini, tentu persoalan ini akan terus dialami oleh setiap generasi.

Kedua, penggunaan simbol agama/keyakinan. Simbol keagamaan/keyakinan di sini lebih mengarah pada bangunan, seperti tempat ibadah (Masjid, Musholla, dan Gereja) serta sekolah keagamaan; yang statusnya menjadi milik, atau pengelolaannya berada di bawah lembaga keagamaan. Dalam konteks tertentu, ketika simbol-simbol tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan sosial, pertemuan, musyawarah, serta perayaan hari-hari besar keagamaan atau kenegaraan tidaklah menjadi persoalan. Tapi, jika simbol-simbol tersebut (dianggap) telah digunakan tidak sebagaimana mestinya, apalagi dengan kandungan materi di dalamnya berisi upaya provokasi, maka di sinilah potensi konflik antar penganut agama/keyakinan itu muncul. Misalnya, ceramah agama yang isinya terlalu provokatif, pengharaman, atau menganggap munafik bagi Muslim yang mendukung pendirian gereja, atau mengarahkan dukungan pada calon pemimpin tertentu dan menjelekkan yang lain, atau penggunaan bangunan gedung sekolah/bangunan lain untuk kebaktian (Kristen).

Ketiga, persepsi keberagama(a)n. Satu hal yang kerap dipertanyakan oleh sebagian besar pemeluk agama Islam adalah: mengapa harus mendirikan bangunan gereja lagi jika jemaatnya justru lebih banyak datang dari luar daerah itu, atau jemaatnya bukan warga setempat? Pertanyaan inilah yang pada taraf tertentu memunculkan prasangka adanya misi Kristenisasi. Padahal, tidak semua warga masyarakat yang Muslim memiliki pemahaman yang komprehensif tentang adanya berbagai denominasi dalam agama Kristen. Dengan kata lain, masih kentalnya anggapan masyarakat bahwa semua agama Kristen itu sama: maka mereka pun menganggap satu gereja saja itu cukup. Kondisi serupa, mungkin juga terjadi di daerah yang mayoritas

⁴ Stara Institute, *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan berkeyakinan*, (Laporan Setara Institute: 18 Desember 2007)

non-Muslim: mengapa perlu mendirikan masjid/musholla lagi jika sudah ada satu. Atau bisa jadi pertanyaan lainnya: jika pendirian gereja harus selalu melalui perijinan yang rumit, mengapa pendirian musholla/masjid sangatlah mudah, bahkan disinyalir tidak sedikit yang tidak ber-IMB, tapi tidak pernah dipersoalkan.

Keempat, persepsi terhadap pemuka agama. Pemuka agama/keyakinan dalam kasus tertentu dianggap terlalu elitis dan politis. Perilaku pemuka agama/keyakinan seringkali menjadi titik awal perselisihan antar agama/keyakinan ataupun antar kelompok/organisasi dalam sebuah agama.

Realitas ini banyak dan mudah untuk dijumpai. Bahkan sudah tidak tabu lagi ketika umat memperbincangkan pemuka agamanya yang dianggap terlalu elitis, atau bahkan politis dalam bertindak. Dalam Pilpres 2014 kemarin misalnya, jelas terlihat bahwa tidak sedikit pemuka agama/keyakinan yang terlibat langsung dalam politik praktis. Keterlibatan mereka dalam politik praktis memang tidak salah. Sebagai warga negara, tentu ia memiliki hak untuk itu. Tapi persoalan yang muncul kemudian adalah ketika terjadi klaim atas nama ketokohan dan penggunaan simbol-simbol agama untuk mengarahkan umat agar memilih sesuai pilihan si tokoh/pemuka tadi. Padahal, tidak sedikit pula umat yang memiliki pilihan berbeda dengan pemuka agama/keyakinannya. Pada level inilah muncul rasa sinisme antara pemuka dan umat. Jika jaman dulu setiap perkataan pemuka agama selalu didengar dan dituruti, tapi belakangan tidak sedikit pemuka agama/keyakinan yang hanya mengikuti kepentingan pribadi, organisasi atau kelompoknya, bahkan hidupnya pun cenderung materialistis. Sehingga tidak heran, jika kondisi ini juga berdampak pada menurunnya legitimasi otoritas dalam mempengaruhi umat. Bahkan pada taraf tertentu menyulut perpecahan umat.

Keadaan tersebut, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jajat Burhanuddin⁵, bahwa di Indonesia, khususnya pada pemeluk agama Islam, muncul fenomena pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama. Bahkan lebih jauh lagi, Abbas Langaji⁶ melihat adanya pergeseran rasa simpati dan penghormatan sosial yang diberikan masyarakat kepada tokoh/pemuka agama serta perubahan persepsi masyarakat tentang keberadaan institusi agama. Menurutnya,

⁵ Jajat Burhanuddin, *The Fragmentation of Religious Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia*, (Studia Islamica, Vol 11. No. 1 2004), h. 29

⁶ Abbas Langaji, *Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama*, (AICIS XII).

sejumlah warga masyarakat muslim memandang peran dan fungsi tokoh agama tidak lagi terlalu penting dalam proses kepemimpinan masyarakat, pemuka agama dipandang bukan sebagai pengambil keputusan dominan masyarakat. Pemuka agama hanya dipersepsi sebagai orang yang bertanggungjawab dalam berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian yang sempit, misalnya mengurus kegiatan ibadah rutin dan penyuluhan agama.

Penurunan kredibilitas tokoh agama di mata masyarakat tersebut, lanjut Sangaji, lebih didasarkan pada persepsi dan pengamatan masyarakat terhadap perilaku keseharian para tokoh yang selalu dikaitkan dengan kesesuaian antara pengetahuan dan wawasan keagamaannya dengan perbuatan dan kehidupan keseharian mereka.

F. PENUTUP IMAJINASI PERDAMAIAN

Kehidupan yang aman, nyaman, damai dan harmonis tentu menjadi cita-cita bersama semua umat beragama/berkeyakinan. Meskipun sampai saat ini berbagai potensi konflik bernuansa agama/keyakinan sangatlah tinggi, tapi bukan berarti tidak ada celah untuk merajut cita-cita mulia tersebut.

Apapun bentuk reaksi masyarakat atas berbagai persoalan akibat keberagaman agama/keyakinan, tampaknya disebabkan oleh adanya ketidaktepatan cara bersosialisasi, minim dan tidak mengakarnya kegiatan dialog, pertemuan, atau forum apapun dalam rangka mengurai keresahan warga masyarakat secara bersama. Hal ini terindikasi dari masih adanya kategorisasi emosional antara mayoritas dan minoritas. Warga yang merasa mayoritas merasa enggan untuk mengajak dialog pihak minoritas. Bahkan tidak jarang mereka yang merasa mayoritas 'menuntut' pihak minoritas untuk mengerti, memahami, dan mawas diri atas keberadaannya. Padahal, seharusnya pihak mayoritaslah yang mestinya lebih sensitif dan pengertian atas perasaan mereka yang minoritas. Sebab, mereka yang merasa minoritas kadangkala merasa enggan atau bahkan takut untuk berbicara dan mengungkapkan berbagai kegelisahan yang dirasakan.

Jika dilihat pada level elit, persoalan dialog seolah dianggap sudah selesai. Tetapi, realitas di akar rumput (*grass-root*), masih banyak berbagai pengakuan dan kesaksian yang menggambarkan bahwa pada level struktur pemikiran paling dalam (*deep structure*) kecurigaan itu masih ada, sehingga menjadi sangat sulit untuk mengangkatnya pada level keterbukaan, meskipun kenyataan formal sehari-hari menunjukkan hubungan sosial yang relatif baik.

Tentu saja, pemahaman, sudut pandang, dan penafsiran yang muncul dari mereka yang masih menganggap adanya misi kristenisasi/islamisasi tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga didorong oleh keberadaan, aktifitas, dan keinginan-keinginan dari kedua belah pihak yang belum bertemu dengan keinginan warga setempat. Selain itu, tampak pula bahwa keinginan untuk menempuh jalur kehidupan penuh damai akan tetap menjadi imajinasi jika tidak segera dilakukan suatu terobosan cara dan strategi dalam bersosialisasi antara warga masyarakat yang beragama ini.

Untuk itu setidaknya perlu dilakukan beberapa upaya sebagaimana berikut, dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pihak pemerintah beserta aparaturnya, elit/pemuka agama, serta masyarakat di tingkat akar rumput.

Pertama, ditumbuhkembangkannya suatu kepercayaan antara pemeluk agama dan kepercayaan bahwa pembangunan tempat ibadah, serta pelaksanaan aktifitas keagamaan (beribadah) tidak berhubungan dengan kegiatan peng-agama-an (kristenisasi/islamisasi). *Kedua*, setiap pemuka agama/keyakinan perlu membangun suatu hubungan sosial yang lebih baik dan lebih terbuka dengan warga sekitar, sehingga kecurigaan dan kebencian yang terpendam bisa terkikis. *Ketiga*, membuka seluas-luasnya kemungkinan dialog antar warga mengenai kondisi keagamaan masing-masing pemeluk agama.

Semua upaya tersebut, tentu tidak akan ada artinya bahkan sia-sia jika tidak dilandasi dengan sifat yang benar-benar terbuka dan bebas dari kepentingan, terutama kepentingan politik. Jika saat Pilpres 2014 ini dikenal koalisi 'tanpa syarat', maka dialog dan upaya perdamaian pun seharusnya bisa tanpa kepentingan. Sehingga dialog yang terjadi bukan lagi sebatas jargon politik, bukan menjadi upaya meraih popularitas, bukan menjadi ukuran dan target sebuah program untuk menyerap anggaran, bukan pula menjadi semacam alat pemadam kebakaran. Tetapi menjadi sebuah aktifitas rutin tanpa perlu adanya sebuah design normatif, karena sudah tertanam dalam ruang bawah sadar setiap insan untuk tidak 'menghakimi' pihak lain yang hakekatnya memang berbeda agama/keyakinannya. Sehingga perbedaan itu bukan lagi menjadi hal aneh, tetapi justru menjadi daya tarik dan perekat sosial tersendiri.

Jika kondisi demikian sudah tertanam dalam alam bawah sadar setiap warga negara, maka tidak akan ada lagi peluang dari para 'politisi kotor' untuk menggunakan dalih dan isu agama untuk meraih kepentingan politiknya. Bahkan partisipasi politik masyarakat sendiri

pun tidak lagi terkungkung atau tersandera dalih agama/keyakinan, tapi partisipasinya benar-benar menjadi otonom. Partisipasi atas dasar kalkulasi rasional demi kebaikan hidup bersama di masa depan. Sehingga kehidupan yang harmonis, sebagai salah satu tujuan dasar dari sistem demokrasi bisa benar-benar terwujud. Sehingga demokrasi yang terjadi bukan lagi hanya bersifat prosedural; yang hanya menghasilkan berbagai aturan dan ancaman sanksi, tapi demokrasi substansial; yang benar-benar mampu mencipatakan kehidupan warga negaranya dalam kondisi adil, sejahtera, tanpa rasa ketakutan akan berbagai ancaman, baik yang bersifat manifes ataupun laten. *Wallahu a'lam bisshawaab.*

* *Tulisan ini merupakan modifikasi atas laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kawasan Asia Timur (PUKKAT) UIN Jakarta 2011, di mana penulis menjadi koordinator penelitiannya.*

BIBLIOGRAFI

- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (Penguin Books, 1991)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2013)
- Burhanuddin, Jajat, *The Pragmentation of Religius Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia*, (Studia Islamica, Vol 11. No. 1 2004)
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of culture: Selected Essayas*, (NewYork, Basic Books 1992)
- Langaji, Abbas, *Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama*, (AICIS XII)
- Nurkholish, Ahmad (dkk.), *Melawan Kekerasan Atas Nama Agama*, (ICRP, Jakarta 2011)
- Stara Institute, *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan berkeyakinan*, (Laporan Setara Institute, 18 Desember 2007)
- “Soal Penyerangan Rumah Ibadah, Komnas HAM Minta Penjelasan Kapolri “ dalam <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/14/time/171917/idnews/867292/idkanal/10> diakses 24 Juni 2011

- “Pemda, Polisi, dan Ormas, Pelaku Terbanyak Pelanggaran dan Intoleransi 2010” dalam http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=196/hl=id/Pemda_Polisi_Dan_Ormas_Pelaku_Terbanyak_Pelanggaran_Dan_Intoleransi_2010 diakses 24 Juni 2011
- “Kekerasan Berbasis Agama Tidak Bisa Ditutup-tutupi” <http://cetidak.kompas.com/read/2010/12/21/03173010/kekerasan.berbasis.agama.tidak.bisa.ditutup-tutupi> Diakses 1 Agustus 2011
- Suaedy, ahmad, dkk, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta, The Wahid Institute, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Wildan, Muhammad, *Mapping Radical Islam: A Study of the Proliferation of Radical Islam in Solo, Central Java*, (dalam Martin Van Bruinessen (ed.), *Contemporary Development in Indonesian Islam*, ISEAS, Singapore 2013

